

PANCASILA DI ARUS GLOBALISASI DALAM MEMPERKUAT REFORMASI MORAL INDONESIA

Syifa Siti Aulia

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Artikel ini akan memunculkan gagasan mengenai pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara di arus globalisasi. Gagasan ini muncul dalam menyikapi perubahan di kehidupan warga negara pasca reformasi dengan perubahan konstitusi sehingga bermunculan berbagai opini di masyarakat mengenai kelemahan hasil reformasi yang dianggap memunculkan timbulnya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Gagasan dalam artikel ini memunculkan pentingnya pemahaman ideologi dalam memperkuat wawasan global warga negara. Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi negara yang dalam tatanan implementasi mampu membuat warga negara siap menghadapi arus globalisasi. Perubahan konstitusi di Indonesia dalam era reformasi seharusnya tidak menjadikan Ideologi Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia memudar karena pada dasarnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan, dan harusnya hingga sekarang di era globalisasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara tentulah pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini peran pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Pembentukan wawasan global warga negara melalui proses pendidikan Pancasila menjadi kajian penting dalam pembentukan warga negara yang baik di era reformasi ini. Dalam kajian gagasan mengenai Pancasila di Arus Globalisasi dalam memperkuat Reformasi Moral Indonesia ini diperlukan tiga kajian utama. *Pertama*, bagaimana seharusnya aktualisasi Pancasila dalam pembentukan moralitas bangsa? *Kedua*, bagaimana bentuk aktualisasi Pancasila di era Globalisasi? *Ketiga*, bagaimana pembudayaan Pancasila di arus globalisasi ini dalam penguatan moralitas bangsa. Ketiga Gagasan tersebut dimunculkan dalam pembahasan yang berupaya memberikan gambaran aktualisasi Pancasila yang penting terutama untuk menjawab krisis moral yang berkepanjangan di Indonesia. Penulis memberikan uraian secara teoretis mengenai pembentukan moralitas di era reformasi ini yang sebenarnya dapat dijawab melalui implementasi Pancasila yang bisa mengarah pada berbagai lini kehidupan.

Kata kunci: *Pendidikan Pancasila, Globalisasi, Reformasi Moral.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini fenomena intoleransi, politik dengan menggunakan isu SARA, penyebaran informasi *hoax*, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media sangat menghiasi berita baik di media televisi lokal, nasional, maupun Internasional. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dampak negatif di era globalisasi sekarang. Nilai

kesantunan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari budaya luhur seakan-akan mulai hilang dari jiwa bangsa Indonesia. Kausa materialis yang dimiliki bangsa Indonesia berupa Pancasila dewasa ini tampaknya sudah keluar dari moralnya Pancasila. Secara ontologis maupun aksiologis Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tidak hanya sebagai ideologi atau *Weltanschauung*, tidak hanya cita-cita mempersatukan semua golongan, tetapi Pancasila adalah suatu moral, suatu pergaulan hidup antara manusia Indonesia yang satu dengan manusia Indonesia yang lainnya tanpa memandang tingkatannya, tanpa memandang keturunannya, tanpa memandang *milieu-sosialnya*.

Di era globalisasi ini Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat di terima di Indonesia dan yang bermanfaat dan mana yang seharusnya tidak di terapkan di Indonesia, semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Kajian ini bertujuan memberikan informasi lebih banyak tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi yang penuh dengan benturan berbagai nilai kehidupan manusia.

PEMBAHASAN

Mengaktualisasikan Pancasila Sebuah Keharusan Moral

Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga Indonesia. Berbicara mengenai sikap moral Lickona (2012:57) membaginya kedalam tiga komponen (*component of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Sikap moral tersebut mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebaikan. Ketiga unsur moral tersebut bertujuan pada terbentuknya individu-individu yang memiliki kematangan terhadap moral dalam kehidupannya. Moralitas berujung pada tingkah laku yang ditampilkan oleh individu dalam kehidupan kesehariannya yang mana seseorang dapat dikatakan memiliki karakter apabila perilakunya sesuai dengan kaidah-kaidah moral.

Dalam wujud mengaktualisasikan Pancasila, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma-norma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

serta hubungannya dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, dalam mengaktualisasikan Pancasila juga diperlukan suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya proses aktualisasi Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Lickona (2013:16) menjelaskan setidaknya terdapat 10 (sepuluh) nilai-nilai harus ditanamkan kepada anak-anak dan generasi muda bangsa, yaitu:

kebijaksanaan (*wisdom*), keadilan (*justice*), keteguhan (*fortitude*), kontrol diri (*self-control*), cinta dan kasih sayang (*love*), perilaku positif (*positive attitude*), kerja keras (*hard work*) dan kemampuan mengembangkan potensi (*resourcefulness*), integritas (*integrity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan kerendahan hati (*humility*).

Sepuluh nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan substansi dan arah pendidikan karakter yang mampu mengembangkan kepribadian personal warga negara. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat dan kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan, bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral.

Perlunya Aksiologis Pancasila Di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai aksiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita hadapi saat ini adalah bagaimana tindak tanduk kita dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa

Indonesia. Ancaman nyata yang ada didepan mata kita dewasa ini adalah munculnya gerakan-gerakan ekstremis, politik adu domba dengan menggunakan isu SARA, adu domba oleh pihak-pihak asing, penyebaran informasi *hoax*, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media. Tantangan tersebut dapat kita hadapi apabila kita dalam bertingkah laku dan bertutur kata berpedoman kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah tersusun secara hierarkis berhubungan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Notonagoro (1984:98-99) menjelaskan hakikat sila-sila Pancasila, antara lain di dalamnya terkandung makna adanya kesesuaian dengan hakikat manusia yang memiliki tabiat saleh, yaitu sifat-sifat keutamaan pribadi manusia yang relatif permanen melekat dalam pribadi manusia yang meliputi sifat-sifat sebagai berikut:

1. Watak penghati-hati/kebijaksanaan: berbuat sesuai dengan pertimbangan akal, rasa dan kehendak.
2. Watak keadilan: memberikan apa yang menjadi hak dirinya dan hak orang lain.
3. Watak kesederhanaan : tidak melampaui batas dalam hal kemewahan, kenikmatan dan rasa enak.
4. Watak keteguhan: tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari: duka dan hal yang enak. Sebagai penyeimbang watak kesederhanaan

Dari pendapat di atas bahwa sifat-sifat dan tabiat saleh tersebut sebagai nilai moral kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Era globalisasi ukuran/standar nilai sosial budaya masyarakat global ikut mempengaruhi eksistensi kepribadian bangsa pada umumnya dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi adalah dengan cara penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi masalah-masalah kekinian. Pancasila bukan hanya sebuah rumusan aturan/norma yang terbentuk secara instan tanpa memiliki sumber yang kuat, melainkan sebaliknya, bahwa Pancasila adalah rumusan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, baik nilai moral agama, sosial dan budaya yang telah mengakar dan melekat bersama eksistensi bangsa Indonesia.

Untuk itu Pancasila harus diaktualisasikan mulai dari kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran secara subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan baik aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran,

ketaatan, serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengetahuan inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang lebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Lickona (Budimansyah, 2011:57) mengembangkan karakter yang baik (*good character*) yang di dalamnya mengandung tiga dimensi nilai moral sebagai berikut:

1. Wawasan Moral (*Moral Knowing*)
 - a. Kesadaran moral (*Moral Awareness*)
 - b. Wawasan nilai moral (*Knowing moral values*)
 - c. Kemampuan mengambil pandangan orang lain (*Perspectivetaking*)
 - d. Penalaran moral (*Moral Reasoning*)
 - e. Mengambil keputusan (*Decision-making*)
 - f. Pemahaman diri sendiri (*Self Knowledge*)
2. Perasaan Moral
 - a. Kata hati atau nurani (*Conscience*)
 - b. Harapan diri sendiri (*Self-esteem*)
 - c. Merasakan diri orang lain (*Empathy*)
 - d. Cinta kebaikan (*Loving the good*)
 - e. Kontrol diri (*Self-control*)
 - f. Merasakan diri sendiri (*Humility*)
3. Perilaku Moral
 - a. Kompetensi (*Competence*)
 - b. Kemauan (*Will*)
 - c. Kebiasaan (*Habit*)

Dalam pengertian ini maka karakter yang baik ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila yang subjektif disebut moral Pancasila. Maka aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Dalam aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami dan diresapi seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus menerus, maka nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia yang disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas (yaitu nilai-nilai Pancasila, sikap dan karakter), sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran secara objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2008) bahwa “Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara (*state policies*) dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat umum dan belum operasional”. Artinya terbentuknya nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam haluan negara dalam rumusan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 dilakukan oleh dan melalui lembaga permusyawaratan rakyat, sedangkan upaya untuk mengawal dalam praktik, agar nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara dilakukan oleh lembaga peradilan konstitusi. Dengan kata lain, fungsi ‘*state policy making*’ berupa Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 itu dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan fungsi pengawalan atas pelaksanaannya dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan (*state policy adjudication*) dalam rangka pengawasan melalui penegakan hukum (*enforcement*). Di antara kedua kutub fungsi ‘*policy making*’ dan ‘*policy enforcing/controlling*’ terdapat wilayah ‘*policy executing*’ yang merupakan wilayah tanggungjawab eksekutif kekuasaan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, kebutuhan bangsa kita untuk menjabarkan rumusan-rumusan nilai dan norma, merevitalisasi, melaksanakan, memasyarakatkan, mendidik dan bahkan membudayakan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga legislatif atau pun lembaga yudikatif untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Pemerintah harus tampil dengan tanggung jawabnya sendiri melalui tujuan pembangunan nasional yang bersumber pada hakikat kodrat manusia mono pluralis yang merupakan esensi dari Pancasila.

Bangsa Indonesia melaksanakan reformasi, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memperbaiki negara yang pada gilirannya yang jauh lebih penting adalah tercapainya tingkat martabat manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi juga harus mendasarkan pada suatu paradigma yang jelas, dan dalam masalah ini paradigma yang harus diletakkan sebagai basis segala agenda reformasi adalah dasar filsafat negara,

yaitu Pancasila. Hal ini bukan merupakan suatu keharusan politik melainkan suatu keharusan logis, sebab jikalau reformasi itu menyangkut masalah-masalah fundamental negara yang terkandung dalam *staatsfundamentalnorm* maka hal itu sudah menyimpang dari makna dan pengertian reformasi, yaitu suatu revolusi.

Kesadaran Untuk Melaksanakan Pancasila

Pancasila perlu diusahakan agar terwujudnya kesadaran dan ketaatan. Kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pengamalan tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Jadi keadaan-keadaan inilah yang menjadikan objek dari kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pengamalan manusia. Pengamalan tersebut bersifat jasmaniah maupun rohaniah dari kehendak manusia. Untuk itu Kaelan (2013:27) merincinya sebagai berikut:

1. Rasa, menimbulkan realisasi tentang kejiwaan
2. Akal, yang menimbulkan realisasi tentang kebenaran (ilmu pengetahuan, pengetahuan, inspirasi, institusi).
3. Kehendak, yang menimbulkan realisasi tentang kebaikan/kebenaran dan realisasi tentang kebahagiaan, jadi berkaitan dengan tingkah laku manusia.

Dari uraian di atas jika diurutkan maka agar manusia sampai pada suatu tingkat kesiapan untuk mengaktualisasikan Pancasila maka yang pertama harus diketahui adalah tentang pengetahuan yang benar tentang Pancasila, memenuhi meresapi, dan menyadari, kemudian menghayati dan pada akhirnya mewujudkannya. Jadi tanpa adanya syarat-syarat tersebut mustahil upaya pelaksanaan realisasi Pancasila dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu diperlukan dalam suatu proses pendidikan yang terarah dan berkesinambungan. Adapun kesadaran dan kesiapan untuk pelaksanaan Pancasila dapat dilakukan dalam praktik hidup sehari-hari, dalam masyarakat, melalui pendidikan, maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya ada dua bentuk realisasi Pancasila yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya atau esensinya yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaniah dan universal, sehingga merupakan ciri khas, karakter yang bersifat tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasi Pancasila senantiasa bersifat dinamis inovatif sesuai dengan dinamika masyarakat, perubahan, serta konteks lingkungannya. Misalnya dalam konteks lingkungan kenegaraan, sosial, politik, hukum, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, kehidupan keagamaan, Lembaga Swadaya

Masyarakat, organisasi masa, seni, lingkungan dunia teknologi informasi dan konteks lingkungan masyarakat lainnya.

Sosialisasi Dan Pembudayaan Pancasila

Gagasan atau nilai-nilai dasar Pancasila itu memang perlu disosialisasikan kepada segenap warganegara Indonesia oleh karena berfungsinya dalam praktik bernegara membutuhkan dukungan warganya. Bagi warganegara biasa dukungan itu berbentuk penerimaan terhadap nilai nilainya, internalisasi nilai yang selanjutnya menjadi acuan penyelesaian soal kebangsaan dan kemampuan kritis jika terjadi penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan bernegara. Bagi warganegara selaku penyelenggara negara, sebagai sumber inspirasi bagi pembuatan kebijakan dan menjadi teladan warga dalam bernegara. Oleh karena itu kesadaran etik maupun kesadaran hukum yang mencerminkan nilai Pancasila amat penting dimiliki oleh semua warganegara Indonesia.

Menurut Kaelan (2013) wujud sistem sosial kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sistem nilai, sistem sosial, dan wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan core values sistem sosial kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial kebudayaan yang multikulturalisme. Oleh karena itu, dalam proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus meliputi tiga dimensi tersebut, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu proses doktriner melainkan justru pembudayaan dan internalisasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan sosial kebudayaan masyarakat nampak semakin kuat pengaruh individualisme, primordialisme, serta fanatisme etnis, ras, golongan maupun agama. Bangsa Indonesia adalah multikultural, multi etnis, dan multi religius, oleh karena itu nilai-nilai persatuan dalam suatu keragaman harus dibudayakan dengan berbasis pada etika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sendirinya, revitalisasi juga harus diikuti dengan upaya pembinaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa.

KESIMPULAN

Globalisasi dengan segala dampak yang ditimbulkannya bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana tindak

tanduk dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai-nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Membudayakan nilai-nilai pancasila dan kaidah-kaidah undang-undang dasar negara RI tahun 1945*. Dokumen Sekretariat Negara
- Budimansyah, Dasim. 2011. *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kaelan. 2013. *Negara kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Lickona, T. 2012. *Educating for character” mendidik untuk membentuk karakter, bagaimana sekolah dapat mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lickona, T. 2013. *Character matters*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila secara ilmiah populer. Cetakan keenam*. Jakarta: Bina Aksara
- Winarno. 2012. *Melaksanakan Pancasila Di Orde Reformasi*. Jurnal Civicus PKn UPI Bandung.